

PROGRAM/AKSI YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

| NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | PROGRAM/ AKSI | |
|----|---|--|--|
| | | 2021 | 2022 |
| 1. | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Webinar Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. 2. Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak. 3. Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Tayangan Televisi yang Meresahkan Masyarakat. 4. Koordinasi Lanjutan Pembangunan Situs Web Bimbingan Perkawinan. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Webinar Nasional PAUD HI 6. Kajian Analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM melalui Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Temanggung. 7. Rakorda Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Percontohan Penurunan Stunting dan Perkawinan Anak Berbasis Keluarga. 8. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut 9. Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Percontohan Penurunan Stunting dan Perkawinan Anak Berbasis Keluarga. 10. Rapat Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Daerah. |
| 2. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Video Challenge Pencegahan Perkawinan Anak bagi Anak. 2. Webinar Strategi Pencegahan Perkawinan Anak untuk Mendukung Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Demi Terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. 3. Kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan Perkawinan Anak untuk Mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal Guna Terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030. 4. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak untuk Pengasuhan Terbaik bagi Anak. 5. Sosialisasi dan Bimtek Pengasuhan Positif. 6. Penyediaan sarana pembelajaran berbasis e-learning. 7. Penyusunan RPermen PPPA tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA. 8. Penyusunan Draft Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga. 9. Koordinasi Strategi Daerah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di 22 Provinsi. 10. PKS antara KemenPPPA dengan MUI terkait SINERGITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 11. Diskusi Interaktif Pencegahan Perkawinan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 15. Penyusunan Suara Anak Indonesia dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Nasional. 16. Diskusi Pendampingan Anak Perempuan Korban Perkawinan Anak. 17. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). 18. Webinar KOLAK KETAN (Kelas Online Anak dan Keluarga terkait kesehatan dan pendidikan). 19. Sosialisasi kesehatan Reproduksi pada kegiatan pembentukan model Kampung Anak Sejahtera. 20. Standardisasi Pengasuhan Anak di Pesantren/Pendidikan Berasrama Berbasis Agama. 21. Penguatan Kesehatan Mental Bagi Anak dan Orang Tua di PUSPAGA. 22. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 23. Kabupaten/Kota Layak Anak. 24. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) 25. Penyusunan RPermen PPPA tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA. 26. Penyusunan Pedoman Kompetensi SDM Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga. 27. Penyusunan RPP terkait Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin bagi Daerah. 28. Penyusunan Policy Brief bersama PUSKAPA UI |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| | | <p>dalam Pandangan Lintas Agama.</p> <p>12. Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <p>13. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran</p> <p>14. Keluarga).</p> | <p>terkait Pencegahan dan Penanganan Anak dengan Kehamilan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.</p> <p>29. Sosialisasi, advokasi, bimtek dan supervisi terkait 5 Arahan Presiden.</p> <p>30. Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam Pembangunan PPPA dan Standardisasi LPLKK bagi daerah.</p> <p>31. Advokasi dan Ujicoba Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.</p> <p>32. Konsepsi RAD Pengasuhan Layak Anak.</p> <p>33. BIMTEK Konvensi Hak Anak (KHA).</p> <p>34. Publikasi KIE / Promosi Cegah Perkawinan Anak dengan Membangun Kualitas Keluarga.</p> |
| 3. | Kementerian Dalam Negeri | <p>1. Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022.</p> <p>2. Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (dengan pemutakhiran terakhir diterbitkan melalui Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021).Tahun 2022</p> | <p>3. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2023.</p> <p>4. Pembuatan SE Pendorong Pembentukan UPTD PPA.</p> |
| 4. | Badan Pusat Statistik | <p>1. Penyediaan data terkait prevalensi perkawinan anak dari Susenas.</p> <p>2. Tersedianya data prevalensi perkawinan anak level nasional dengan disagragasi daerah perkotaan & perdesaan pada website BPS.</p> | <p>3. Penyediaan data terkait prevalensi perkawinan anak dari Susenas.</p> <p>4. Tersedianya data prevalensi perkawinan anak level nasional dengan disagragasi daerah perkotaan & perdesaan pada website BPS.</p> |
| 5. | Kementerian Sosial | <p>1. Program Keluarga Harapan.</p> <p>2. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)</p> <p>3. Asistensi Rehabilitasi Sosial</p> | |
| 6. | Kementerian Komunikasi dan Informasi | <p>1. Produksi dan Publikasi Konten:</p> <p>1) Hukuman Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.</p> <p>2) Dampak Perkawinan Anak.</p> <p>3) Gender dan Jenis Kelamin.</p> <p>4) Hari Anak Nasional.</p> <p>5) Literasi Digital untuk Anak, dan Tips Pengasuhan Positif.</p> <p>6) Isu Perempuan dan Anak di G20 Women's Empowerment.</p> <p>2. Web Seminar:</p> <p>1) Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.</p> | <p>5. Forum Pencegahan Perkawinan Anak</p> <p>6. Produksi dan Publikasi Konten PPA</p> <p>7. Penyusunan Konten PPA</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 2) Peran Keluarga dan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. 3. Forum Sosialisasi dan publikasinya terkait Perempuan Digital Lindungi Keluarga. 4. Pemetaan Sektor Sosial | |
| 7. | Kementerian PPN/BAPPENAS | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perkawinan Anak dengan UNICEF. 2. Penyusunan Toolkit Stranas PPA. 3. Pendampingan isu Independent Children Lawyer bagi anak yang mengajukan Dispensasi Kawin. 4. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Stranas PPA dengan KemenPPPA. 5. Penyusunan Buku Saku Optimalisasi Kapasitas Anak dengan Plan Indonesia. | <ul style="list-style-type: none"> 6. Penyusunan Dashboard Pencegahan Perkawinan Anak. 7. Penyusunan Layanan bagi Anak yang Hamil/Terlanjur Menikah. 8. Finalisasi Toolkit Stranas PPA. 9. Finalisasi Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perkawinan Anak. 10. Penyusunan Kajian Child Budget untuk Stranas PPA. |
| 8. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan UKS. 2. Fasilitasi dan Advokasi Pencegahan Siswa Rentan Putus sekolah. 3. Penyusunan Panduan dan Modul Pendampingan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dan Kekerasan. 4. Bimtek Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Kekerasan. | <ul style="list-style-type: none"> 5. Bimtek Pengelolaan UKS. 6. Fasilitasi dan Advokasi Pencegahan Siswa Rentan Putus sekolah. 7. Penyusunan Panduan dan Modul Tunas Pancasila, Bela Negara, Pencegahan Intoleransi, Kekerasan Seksual dan Perundungan melalui Ekstra Kurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan. 8. Bimtek Bela Negara, Tunas Pancasila dan Pencegahan Intoleransi, Kekerasan Seksual dan Perundungan yg terintegrasi dengan Ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan terintegrasi. |
| 9. | Mahkamah Agung | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 2. Koordinasi dengan Kementerian PPPA terkait Pencegahan Perkawinan Anak. | <ul style="list-style-type: none"> 3. Koordinasi dengan Kementerian PPPA terkait Pencegahan Perkawinan Anak. |
| 10. | Kementerian Agama | <ul style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. 2. Bimbingan perkawinan. | <ul style="list-style-type: none"> 3. Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. 4. Bimbingan perkawinan. 5. Penyusunan Rancangan PerMen terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan. |
| 11. | Kementerian Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Orientasi Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga Kesehatan. 2. Pelatihan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Guru di Satuan Pendidikan Khusus. 3. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Kesehatan Masyarakat -Kemenkes dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan -Kemdikburistik | <ul style="list-style-type: none"> 4. Orientasi Model sekolah / Madrasah Sehat. 5. Tranformasi/Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. 6. Orientasi integrasi pelayanan kesehatan primer. 7. Rekomendasi dan Regulasi Penyelenggaraan integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas, Posyandu primer dan posyandu. |

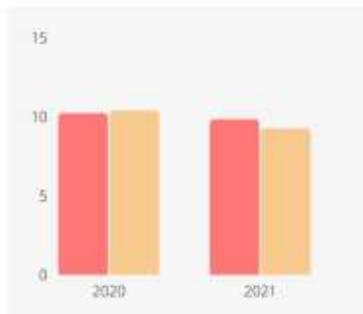
| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | dalam Peningkatan Kompetensi Kesehatan. | 8. Koordinasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Program Kemitraan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Guru SMP. 9. Koordinasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. |
| 12. | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1. Penyusunan Panduan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. | 2. Finalisasi Penyusunan Panduan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. 3. Penyusunan SKB 2 Menteri (PPPA dan Menteri Desa PDTT) tentang Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. 4. Penyusunan Pedoman Mekanisme perlindungan Anak di Desa Berbasis Masyarakat. |
| 13. | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) | 1. Webinar Pencegahan Perkawinan Usia Anak "Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin: Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak. | 2. Pengawasan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di 5 Provinsi / Kabupaten/Kota (Lombok Barat, Tanjung Pinang, Kotabaru, Kediri, dan Kota Tangerang) |
| 14. | BKKBN | 1. Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui pembinaan BKR dan GenRe. 2. Penyusunan pedoman pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter. 3. Penyusunan pedoman peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga. 4. Optimalisasi Pemanfaatan Elsimil (sistem kesiapan menikah dengan status Kesehatan remaja) 5. Optimalisasi pemanfaatan website SiapNikah. | 6. Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui pembinaan BKR dan GenRe. 7. Penyusunan pedoman pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter. 8. Optimalisasi Pemanfaatan Elsimil (sistem kesiapan menikah dengan status Kesehatan remaja). 9. Optimalisasi pemanfaatan website SiapNikah. |
| 15. | MAMPU | 1. Sosialisasi dispensasi perkawinan dan batas minimum usia perkawinan. 2. Penyusunan data perkawinan anak di Indonesia. 3. Kampanye KHA. 4. Pengembangan produk publikasi populer PPA. Membangun kewirausahaan Perempuan Muda. | |
| 16. | UNICEF | 1. Program BERANI (<i>Better Reproductive Health for All in Indonesia</i>) 2. Studi Implementasi Peraturan Desa tentang PPA (bersama UI & Rumah Kita). 3. Draft Panduan Pembentukan Peraturan Desa/Daerah tentang PPA. 4. Jaringan AKSI untuk koordinasi dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil. 5. Bahtsul Masail "Pencegahan Perkawinan Anak" kerja sama Muslimat NU – UNICEF – Pemerintah Indonesia". 6. Penyusunan tools program BERANI (Pendidikan Kecakapan Hidup, Board Game, Ustadzah Toolkit, dll). 7. Penyusunan Toolkit Stranas PPA dan Studi COVID terhadap Perkawinan Anak. Penyusunan Studi COVID-19 terhadap Perlindungan Anak di Papua. | |
| 17. | UNFPA | 1. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak di tokoh agama dan organisasi masyarakat. 2. Dokumentasi praktik terbaik terkait PPA di 5 Kabupaten. Piloting pencegahan KBG dan praktek berbahaya menggunakan pendekatan keluarga dan melibatkan laki-laki di | |

| | | |
|-----|----------------|--|
| | | Lombok Utara. |
| 18. | AIPJ2 | 1. Penerbitan kajian Mendukung Pelaksanaan Stranas PPA. 2. Pengembangan konsep program Independent Children Lawyer bagi anak yang mengajukan Diska di Indonesia. Penyusunan Toolkit Stranas PPA. |
| 19. | Plan Indonesia | 1. Program Yes I Do. 2. Peluncuran Buku Saku Mari Kita Cegah Perkawinan Anak untuk Optimalisasi Kapasitas Anak. 3. Pelaksanaan program GEMA CITA. |

DATA INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK

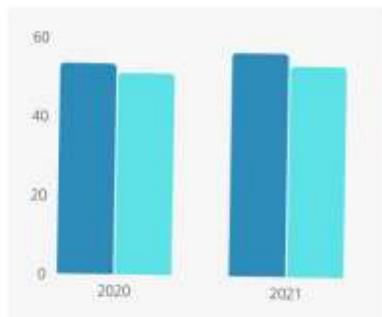
| Data (Nasional) | Tahun | | | Sumber |
|--|-------|-------|-------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Presentase perempuan umur 20-24 yang menikah sebelum umur 18 tahun | 10,82 | 10,35 | 9,23 | Badan Pusat Statistik |
| Presentase perempuan umur 20-24 yang menikah sebelum umur 15 tahun | 0,57 | 0,5 | 0,58 | Badan Pusat Statistik |
| Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | 52,61 | 51,00 | 53,33 | Kompilasi data Badan Pusat Statistik dan DPR RI |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,94 | 72,29 | 72,91 | Badan Pusat Statistik |

CAPAIAN PEREMPUAN BERUSIA 20-24 TAHUN YANG MENIKAH SEBELUM UMUR 18 TAHUN



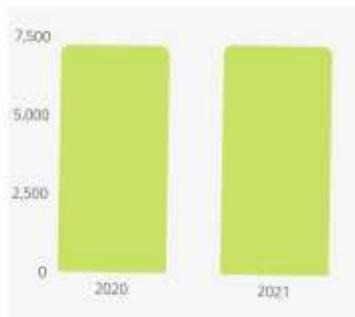
| Prevalensi | | Capaian | |
|------------|-------|---------|-------|
| 2020 | 10.19 | 2020 | 10.25 |
| 2021 | 9.8 | 2021 | 9.23 |

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)



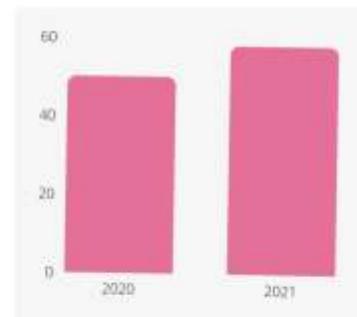
| Target | | Capaian | |
|--------|-------|---------|-------|
| 2020 | 55.33 | 2020 | 51.00 |
| 2021 | 56.5 | 2021 | 53.33 |

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



| Target | | Capaian | |
|---------------------------------|--|---------|-------|
| Mengalami kenaikan setiap tahun | | 2020 | 7.239 |
| | | 2021 | 7.291 |

CAPAIAN PEREMPUAN BERUSIA 20-24 TAHUN YANG MENIKAH SEBELUM UMUR 15 TAHUN



| Target | | Capaian | |
|----------------------------------|--|---------|------|
| Mengalami penurunan setiap tahun | | 2020 | 0.30 |
| | | 2021 | 0.58 |